

## *The Effect of Good Corporate Governance and Company Profitability on Tax Avoidance*

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

**Ni Made Ari Puspita Yanti<sup>1</sup>, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani<sup>2\*</sup>, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(\*) Corresponding Author: [sripurnama@undhira.ac.id](mailto:sripurnama@undhira.ac.id)

#### Article info

<p><b>Keywords:</b>  <i>Good Corporate Governance, Profitability, Tax Avoidance</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Abstract</b></p> <p><i>This study was conducted at subsector enterprise of food and beverage listed at Indonesia Stock Exchange for the period of 2018-2021. The population of this study was all companies sub sector of food and beverage listed at Indonesia Stock Exchange for the period of 2018-2021 and the number 34 companies. The number of sample taken was 13 companies with non-probability sampling method and by purposive sampling technique. The method of analysis data used in this study was multiple linear regression analysis. The result showed that good corporate governance which was proxied by quality impact negative to tax avoidance, institutional ownership impact negative to tax avoidance, independent commissioner impact negative to tax avoidance. Profitability was proxied with return on assets impact negative to tax avoidance.</i></p>
<p><b>Kata kunci:</b>            Good Corporate Governance, Profitabilitas, Tax Avoidance</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>good corporate governance</i> dan profitabilitas perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2021. Populasi pada studi ini yakni semua perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI periode 2018-2021 sejumlah 34 perusahaan. Jumlah sampel yang diambil yaitu 13 perusahaan dengan metode <i>non probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i>. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Profitabilitas yang diproksikan dengan <i>return on assets</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

#### PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sumber dana pemerintah, dan memiliki peran serta kontribusi yang sangat penting (Dewi et al., 2020). Sedangkan, pajak menurut industri yakni biaya yang dapat menurunkan keuntungan industri tersebut. Semakin tinggi kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh industri, maka industri akan berupaya

mengadakan perencanaan pajak untuk menyusutkan pajaknya. Kegiatan tax avoidance menjadi masalah utama yang dihadapi oleh berbagai Negara, terutama untuk transaksi komersial lintas Negara yang dijalankan perusahaan terkait. Penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional termasuk di dalamnya adalah perusahaan manufaktur yang banyak memiliki anak perusahaan. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman termasuk sektor banyak memiliki anak perusahaan dibandingkan dengan dari sub sektor yang lainnya dan juga termasuk sub sektor yang terbanyak menyumbangkan penerimaan pajak. Industri ini menyumbangkan sampai Rp. 56,60 triliun ditahun 2018 serta mengalami pertumbuhan senilai 7,91% yang melebihi pertumbuhan ekonomi senilai 5,71% (kemenperin.go.id, 2019).

Tahun 2020 penemuan tax avoidance diperkirakan sudah merugikan Negara senilai 68.7 triliun rupiah per tahunnya. Dalam laporan "*Tax Justice Network*" sejumlah Rp 67,6 triliun yakni hasil tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Sedangkan sisanya senilai Rp 1,1 triliun asalnya dari WP (Wajib Pajak) individual. Hasil temuan tersebut mengindikasikan banyak perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke beberapa negara yang kewajiban pajaknya rendah. Hal tersebut ditujukan agar perusahaan tidak melaporkan hasil keuntungan yang didapatkannya di negara dimana bisnisnya beroperasi. Pada saat yang sama, WP orang pribadi yang diklasifikasikan sebagai kaya memiliki asset tersembunyi serta pendapatan diumumkan di luar negeri yang tidak dalam cakupan undang – undang (Santoso dan Hidayat, 2020).

Asimetri informasi terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan di antara pengelola perusahaan dan pemerintah, akibat adanya masalah keagenan tersebut akibatnya muncul konsep teori agency ataupun teori keagenan (Jefri dan Khoiriyah, 2019). Dijelaskan dalam teori keagenan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976 termasuk perjanjian diantara satu individu ataupun lebih dimana pihak pemilik perusahaan (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) guna menjalankan satu usaha ataupun bisnis dan memberi otoritas kepadanya guna memutuskan keputusan. Pihak manajerial yang bertindak selaku pengelola usaha lebih memahami informasi terkait perusahaan dan kelangsungan perusahaannya daripada pihak prinsipal dan stakeholder lainnya. Adanya perbedaan kepentingan agen dan prinsipal menyebabkan agen bertindak tidak sesuai dengan kehendak prinsipal (Arief, 2021).

Kusnadi dan Pandoyo (2022) menyatakan, ada kemungkinan korporasi bisa mengambil langkah-langkah yang berbeda guna meminimalkan kewajiban pajaknya guna memaksimalkan pendapatan. Pemerintah sangat bergantung pada uang pajak, oleh karena itu bisa dimengerti pemerintah lebih suka bila wajib pajak membayar bagiannya secara adil. Ini bertentangan dengan niat perusahaan guna mengurangi kewajiban pajaknya. *Tax avoidance* merupakan praktik memanfaatkan celah hukum guna menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan (Susilowati *et al.*, 2020).

Perlunya pengelolaan pajak yang efektif mendorong berkembangnya prinsip tata kelola perusahaan meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan (Oliviana dan Muid, 2019). *Good corporate governance* yakni kerangka kerja guna memimpin dan mempertahankan bisnis dengan cara yang menguntungkan banyak pemangku kepentingan dan investor. Perusahaan yakni satu dari subjek pajak, dan tata kelola perusahaan termasuk gambaran hubungan dari seluruh pihak yang ada di perusahaan, dan hubungan ini bisa mengarahkan kinerja perusahaan (Marselawati *et al.* 2018). GCG atau *Good corporate governance* yang mengklasifikasikan bagaimana industri di Indonesia membayar pajak mereka (Syuhada *et al.*, 2019).

GCG mempunyai tujuan terkait dengan akuntabilitas, tanggung jawab, dan sistem perusahaan guna memastikan sikap perusahaan apakah baik guna melindungi investor, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Keberhasilan perusahaan diperkirakan akan diperoleh dari kemampuan manajer dalam menerapkan tata kelola

perusahaan efektif (Waluyo, 2017). GCG diterapkan guna memperkuat kualitas tata kelola perusahaan, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham, serta menghilangkan konflik kepentingan diantara agen dan prinsipal dalam praktik penghindaran pajak

Indikator lain korporasi melakukan penghindaran pajak yakni profitabilitas. Kapasitas perusahaan guna menghasilkan keuntungan pada jumlah penjualan tertentu bisa disimpulkan dari profitabilitasnya. ROA yakni metode standar guna menghitung profitabilitas perusahaan. (Arianandini dan Ramantha, 2018). Studi ini memiliki manfaat bagi mahasiswa bisa menambah wawasan serta pengetahuan peneliti tentang berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, bagi perusahaan bisa memberi informasi perihal komponen - komponen yang memengaruhi praktik *tax avoidance* dan menjadi dasar dalam mempertimbangkan keputusan perencanaan perpajakan, bagi pemerintah memberi kemanfaatan bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama di bidang perpajakan, dan bisa dipakai sebagai pendukung penelitian sebelumnya dan juga sebagai dasar guna memperluas ruang lingkup penelitian ataupun memberi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif, yakni studi ilmiah sistematis yang dirancang guna mendeskripsikan tentang korelasi sebab akibat diantara fenomena dan keterkaitannya. Studi ini dilakukan guna meneliti pengaruh GCG yang diwakili dengan kualitas audit, kepemilikan institusional, komisaris independen dan profitabilitas yang diwakili dengan *return on asset* (ROA) berkenaan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI pada periode 2018 – 2021. Data dipakai di studi ini yakni data sekunder, dimana data didapat peneliti bukan termasuk hasil pengumpulan dan pengolahan sendiri, melainkan hasil yang disusun oleh pihak ataupun lembaga lain. Metode regresi linier berganda dipakai guna menganalisis data untuk penelitian ini. Dengan memakai analisis Regresi add-on SPSS, kita bisa menguji pengaruh berbagai faktor independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Sampel survei menggunakan *purposive sampling* sehingga didapatkan 13 perseroan yang mencukupi standar semasa rentang waktu penelitian 4 tahun. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 52 perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AUDIT	52	,00	1,00	,3846	,49125
INST	52	21,00	87,00	67,1154	20,28779
KOMIN	52	,33	,50	,3977	,07128
ROA	52	1,00	42,00	11,0385	7,90126
CETR	52	,05	11,11	,4487	,10817
Valid N (listwise)					

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Dari 52 sampel penelitian, ditemukan hasil GCG yang diwakili dengan kualitas audit memaparkan nilai minimum yakni 0 dan nilai maksimumnya yakni 1. Mean untuk kualitas audit yakni 0,38, maksudnya rata-rata kualitas audit 0,38 yang artinya mayoritas perseroan diaudit oleh KAP *non Big Four*. Kepemilikan institusional memaparkan nilai minimum yakni 21 persen dan nilai maksimumnya yakni 87 persen. Mean untuk kepemilikan institusional yakni 67,11 persen, maksudnya rata-rata kepemilikan institusional senilai 67,11 persen dengan nilai standard deviasi 20,28 dibawah nilai rata-rata sehingga bisa dikatakan distribusi data sudah baik. Komisaris independen memaparkan nilai minimum yakni 0,33 dan nilai maksimumnya yakni 0,50. Mean untuk komisaris independen yakni 0,397, maksudnya rata-rata komisaris independen senilai 0,39 dengan nilai standard deviasi 0,071 dibawah nilai rata-rata sehingga bisa dikatakan distribusi data sudah baik. Profitabilitas yang diwakili dengan *return on assets* memaparkan nilai minimum yakni 1,0 persen dan nilai maksimumnya yakni 42 persen. Mean untuk ROA yakni 11,03, maksudnya rata-rata senilai 11,03 persen dengan nilai standard deviasi 7,90 dibawah nilai rata-rata sehingga bisa dikatakan distribusi data sudah baik. *Tax avoidance* (Y) memaparkan nilai minimum yakni 0,05 dan nilai maksimumnya yakni 11,11. Mean guna *tax avoidance* yakni 0,44, maksudnya rata-rata *tax avoid* senilai 0,44 persen dengan nilai standard deviasi 0,108 dibawah nilai rata-rata sehingga bisa dikatakan distribusi data sudah baik.

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas yakni guna melihat informasi yang dipakai dalam analisis mengikuti distribusi normal. Pada studi ini pengujian normalitas residualnya dengan uji statistik non parametik Kolmogorovsmirnov. Data berdistribusi normal bila  $Asymp.sig (2-tailed) > \alpha$  dengan  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji menunjukkan *unstandardized residu* bernilai *Asymp.Sig (2-tailed)* yakni senilai 0,212 nilai *asypm.sig* tersebut diatas 0,05 maksudnya seluruh data berdistribusi normal.

##### 2) Uji Multikolinieritas

Ada tidaknya gejala multikolinieritas ditentukan dengan memakai uji multikolinieritas. Variabel independen dalam model regresi yang valid seharusnya tidak berhubungan satu sama lain (Ghozali, 2018). Nilai *tolerance* dan VIF bisa dipakai guna mendeteksi multikolinieritas dalam satu model. Apabila nilai toleransinya  $> 0,10$  ataupun  $VIF < 10$ , artinya tak terjadi multikolinieritas. *Tolerance* variabel kualitas audit senilai 0,907, kepemilikan institusional senilai 0,918, komisaris independen senilai 0,710, dan ROA senilai 0,748 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel kualitas audit senilai 1,103, kepemilikan institusional senilai 1,090, komisaris independen senilai 1,408, dan ROA senilai 1,336 akibatnya seluruh variabel bebas bernilai *tolerance* lebih dari 0,10 ataupun *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ , disimpulkan tidak ada multikolinieritas diantara variabel bebas dalam model regresi.

##### 3) Uji Autokorelasi

Untuk melihat apakah ada hubungan diantara data dari  $t-1$  dan  $t+1$ , dilakukan uji autokorelasi ( $t_1$ ). Model uji yang efektif tidak akan memaparkan adanya autokorelasi. guna melakukan uji autokorelasi, istilah kesalahan gangguan mungkin dikenai uji Durbin-Watson. Dengan kemungkinan 95%, pada model 1 dengan jumlah data ( $N$ ) = 52 dan jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 4, akibatnya nilai *Durbin Watson*:  $d_1 = 1,3$  dan  $d_u = 1,7$ , sehingga diperoleh  $4 - 1,3 = 2,7$  dan  $4 - 1,7 = 2,3$ . Pada penelitian ini semua instrumen variabel tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas dipakai uji glejser. bila nilai absolut dari nilai signifikansi residual statistik untuk variabel independen lebih dari = 0,05, akibatnya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil pengujian kualitas audit memiliki nilai signifikansi 0,531, kepemilikan institusional memiliki nilai 0,462, komisaris independen memiliki nilai 0,366, dan ROA 0,901 yang artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

Regresi Linier Berganda

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik**

Variabel Terikat	Variabel Bebas	B	t <sub>hitung</sub>	Sig.
<i>Tax avoidance</i> (Y)	Kualitas audit (X1)	-0,755	-2,189	0,044
	Kepemilikan institusional (X2)	-0,009	-2,992	0,004
	Komisaris independen (X3)	-3,677	-2,435	0,030
	ROA (X4)	-0,003	-2,445	0,029
F <sub>hitung</sub>	=51,039			
Sig F	= 0,000			
Konstanta	= 1,044			
R	= 0,785			
R <sup>2</sup>	= 0,616			
Adjusted R square	= 0,612			

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Uji Kelayakan Model

1) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil R<sup>2</sup> dari uji koefisien determinasi mengungkapkan seberapa baik variabel independen saat menguraikan variabel dependen. Tabel menampilkan nilai R<sup>2</sup> senilai 0,616 yang memaparkan kualitas audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ROA masing-masing menyumbang 61,6% dari variasi jumlah penghindaran pajak, sementara itu sisanya 38,4% diperhitungkan oleh variabel lain tidak termasuk dalam model penelitian.

2) Uji F

Uji statistik (*f – test*) dipakai guna menjelaskan akibat variabel bebas terhadap *tax avoidance*. Dasar keputusan dalam pengujiannya, yakni:

- a) Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , berarti H<sub>0</sub> ditolak, akibatnya persamaan model regresi layak digunakan.
- b) Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , berarti H<sub>0</sub> diterima akibatnya persamaan model regresi tidak layak digunakan.
- c) Apabila uji signifikansi  $F < \alpha = 0,05$  berarti H<sub>0</sub> ditolak akibatnya variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependennya.
- d) Apabila uji signifikansi  $F > \alpha = 0,05$  berarti H<sub>0</sub> diterima akibatnya variabel independen secara simultan tidak memengaruhi variabel dependennya.

Berdasarkan hasil uji (*f – test*)  $F_{hitung}$  didapat sebesar 51,039, sementara itu  $F_{tabel}$  sebesar 2,57 dengan demikian terdapat dampak kualitas audit, kepemilikan institusional, komisaris independen dan ROA secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

### Uji Hipotesis

#### 1) Uji T

Uji statistic t guna melihat dampak satu variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2018). Nilai signifikansi yang dipakai yakni 0,05. Dasar guna mengambil keputusan yaitu:

- a) Bila nilai signifikan  $t < 0,05$  maksudnya adanya dampak secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikatnya ataupun H1 diterima.
- b) Bila nilai signifikan  $t > 0,05$  maksudnya tidak adanya dampak secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikatnya ataupun H1 ditolak.

Tabel diatas menerangkan variabel kualitas audit memiliki  $t_{hitung} -2.189$  yang artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. variabel kepemilikan institusional memiliki  $t_{hitung} -2.992$  yang artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. variabel komisaris independen memiliki  $t_{hitung} -2.435$  yang artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *return on asset* memiliki  $t_{hitung} -2.445$  yang artinya terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan temuan penelitian kualitas audit berdampak negatif dan memiliki implikasi signifikan terhadap *tax avoidance*, ini mengindikasikan semakin tinggi kualitas audit akibatnya *tax avoidance* semakin menurun dan terdapat tidak ada perbedaan kualitas audit perseroan diaudit oleh KAP big four dengan KAP *non big four*. Kualitas audit mewakili transparansi yang termasuk satu dari komponen GCG. Dengan adanya transparansi ini mengharuskan kelengkapan dan keakuratan pada laporan yang disusun oleh pihak manajemen. Penerapan GCG yang baik bisa meminimalkan perselisihan keperluan pada konsep keagenan diantara perseroan sebagai agen dengan pemerintah sebagai prinsipal (Maharani dan Juliarto, 2019). Temuan riset ini sama dengan Mareta *et al.* (2019), Mira dan Purnamasari (2020), dan Kusnadi dan Pandoyo (2022) mengatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut bertumpu dengan DSPAP (Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia) serta dengan berkembangnya KAP *non big four* di Indonesia belakangan ini juga menjadi pertimbangan bagi industri untuk menjadikan mereka sebagai auditor dikarenakan hasil kualitas audit tidak jauh berbeda (Sari dan Somoprawiro, 2020). Dalam kenyataan auditor KAP *non big four bisa* mempertahankan sikap independensinya dalam pelaksanaan audit sehingga perusahaan akan lebih sulit guna melakukan *tax avoidance* Mareta *et al.* (2019).

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Berlandaskan temuan riset kepemilikan insitusional berdampak negatif dan memiliki implikasi signifikan terhadap *tax avoidance*, ini mengindikasikan semakin tinggi kepemilikan institusional akibatnya praktik penghindaran pajak semakin menurun. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi akibatnya hal ini bisa membatasi sikap manajer dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional bisa memengaruhi upaya pengawasan oleh pihak institusional sehingga hal ini bisa menghalangi perilaku *optimistic* pihak manajemen perusahaan dan berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi pihak manajemen untuk taat pajak

(Sintyawati dan Dewi, 2018). Menurut teori keagenan, kepemilikan institusional memiliki kedudukan fundamental untuk meminimalkan ketidakseimbangan kekuatan pemegang saham-manajer. Pemegang saham besar memiliki kekuatan guna membuat para eksekutif mendahulukan kesuksesan perusahaan di atas keinginan mereka sendiri (Saifi, 2019). Temuan riset ini sama dengan Marselawati *et al.* (2018), Yulyanah dan Kusumastuti (2019), Mareta *et al.* (2019), Sulhendri dan Wulandari (2020) dan Pratomo dan Rana (2021) yang mengatakan kepemilikan institusional dipandang mempunyai sumber daya yang lebih banyak dipadankan pemegang saham lainnya akibatnya diyakini mampu melaksanakan inspeksi yang baik terhadap setiap tindakan manajemen dan menerapkan metode inspeksi yang efisien dalam setiap keputusan perusahaan, yang keduanya berdampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Temuan penelitian mengindikasikan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, ini mengindikasikan apabila bertambah banyak jumlah komisaris independen akibatnya kegiatan penghindaran pajak semakin menurun. Hal ini dikarenakan komisaris independen bisa menghambat kepentingan pemilik saham dalam hal ini pemilik saham menginginkan efisiensi biaya termasuk biaya pajak, sebab komisaris independen mempunyai fungsi guna mengawasi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pemegang saham, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan praktik *tax avoidance* (Dewi, 2019). Dengan komisaris independen bertindak sebagai pengawas perusahaan, masalah keagenan seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus bisa dikurangi, dan manajer yang memiliki insentif guna meminimalkan pajak yang dibayarkan guna memaksimalkan bonus mereka sendiri untuk bertambah cermat dalam pengambilan langkah dan bertambah transparan dalam pelaporan mereka guna meminimalkan penghindaran pajak. (Dewi dan Oktaviani, 2021). Dewi (2019) mengatakan komisaris independen memiliki kontribusi yang esensial dalam menetapkan manajemen perpajakan. Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja perusahaan secara independen, dengan keberadaannya tersebut membuat perusahaan bisa memunculkan prestasi yang maksimal. Temuan ini sama dengan Saputri (2018) dan Pratomo dan Rana (2021) mengatakan komisaris independen berdampak secara negatif terhadap *tax avoidance* Memiliki komisaris yang tidak memihak pada staf memungkinkan organisasi guna memastikan manajemennya mengikuti praktik terbaik ketika membuat keputusan penting. Memiliki jumlah komisaris independen yang tinggi berarti pengawasan yang lebih ketat, yang pada gilirannya menyebabkan manajemen untuk lebih cermat dalam memutuskan ketetapan dan dengan demikian mengurangi penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Return on Asset* Terhadap *Tax Avoidance***

Temuan penelitian mengindikasikan apabila semakin tinggi profitabilitas (*return on assets*) akibatnya *tax avoidance* semakin menurun. Karena pemerintah lebih cenderung guna meneliti dan mengawasi bisnis dengan keuntungan tinggi, bisnis tersebut lebih cenderung membayar pajak mereka karena takut dikenakan hukuman yang lebih berat di masa depan, dan pendapatan besar termasuk indikator kesehatan keuangan perusahaan. cukup baik sehingga beban pajak tidak perlu ditekankan (Hidayat, 2018). Sophian dan Putra (2022) mengatakan hubungan profitabilitas dengan teori keagenan, profitabilitas sebagai pemicu agen guna mengembangkan keuntungan perusahaan dengan mencerminkan kapabilitas persoran ketika mendapatkan margin melalui penggunaan

sumber daya seperti kas, jumlah cabang, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, modal dan lainnya. perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah, menggambarkan agen belum maksimal dalam mengelola perusahaan, dan hal tersebut akan mengganggu prinsipal karena dianggap tidak memenuhi kepentingan mereka. Kapasitas manajemen guna mengelola kekayaan perusahaan mereka bisa diukur dengan melihat profitabilitas, yang termasuk tingkat di mana keuntungan dibuat dalam kaitannya dengan biaya aset dan modal perusahaan (Rozak et al, 2019). ROA yakni metrik yang berguna guna mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Temuan riset yang sama oleh Saputri (2018), Jefri dan Khoiriyah (2019) dan penelitian Egbunike *et al* (2021) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena entitas yang memiliki ROA tinggi cenderung memiliki pajak perencanaan yang baik, sehingga mampu menghasilkan pajak yang dapat memaksimalkan keuntungan tanpa harus melakukan penghindaran pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka kesimpulannya bahwa, GCG yang diwakilkan dengan kualitas audit, kepemilikan institusional, komisararis independen dan profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan temuan dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1) Penelitian ini diharap bisa dijadikan informasi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP), untuk memantau praktik penghindaran pajak dari bisnis yang menguntungkan untuk memastikan pendapatan pemerintah mencapai hasil yang lebih optimal. 2) Bagi peneliti berikutnya bisa memakai alat ukur lain dalam pengujian variabel penghindaran pajak, yakni CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan BTD (*Book-tax-differences*).

### DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3).
- Arief, H. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2020) (Doctoral dissertation, Unsada).
- Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3),
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40-51.
- Egbunike, F. C., Gunardi, A., Ugochukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate *Tax avoidance* in Nigeria: A Quantile Regression Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 20-44.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

- Hidayat, D. W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia.
- Jefri, J., & Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan *Return on assets* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Akuntabilita: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 3(2).
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. "Industri Makanan dan Minuman jadi Sektor Kampiun". <https://kemenperin.go.id/artikel/20298/Industri-Makanan-dan-Minuman-Jadi-Sektor-Kampiun>, diakses pada 5 Mei 2021.
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 2(2), 257-263.
- Maretta, D., & Widyastuti, T. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 188-197.
- Maharani, W., & Julianto, A. 2019. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4)
- Marselawati, Dina dkk. 2018. The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed on Indonesia stock Exchange Period 2013-2016). *Internasional Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*.
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211-226.
- Oliviana, A., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Rozak, T. S., Hardiyanto, A. T., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap *Tax avoidance*. *(JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Saputri, F. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara* 1(6).
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90-103.
- Sintyawati, N. L. A., & Dewi, M. R. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Biaya Keagenan pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 933.
- Sophian, S., & Putra, J. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perbankan yang Terdaftar di burSa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 3(1), 233-240.
- Sulhendri, S., & Wulandari, N. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131-136.

- Syuhada, A., Yusnaini, Y., & Meirawati, E. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(1).
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17-36.